



## Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* (SIKS-NG) : Studi Literatur

Nada Larissa Ramadhani<sup>1</sup>, Siti Nuraeni<sup>2</sup>, Gilang Firman Faira<sup>3</sup>, Cantika Meta Sari Kinanti<sup>4</sup>, Zulfa Al Dina<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

[1nadalarissa2@gmail.com](mailto:nadalarissa2@gmail.com), [2sitinuraeny13@gmail.com](mailto:sitinuraeny13@gmail.com), [3gilangfirmanfaira09@gmail.com](mailto:gilangfirmanfaira09@gmail.com), [4happynanthi@gmail.com](mailto:happynanthi@gmail.com),

[5zulfaaldn2@gmail.com](mailto:zulfaaldn2@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai transformasi digital dalam pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) yang diintegrasikan melalui aplikasi sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) yang merupakan implementasi e-government di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran aplikasi SIKS-NG dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, akurasi dan transparansi pengelolaan data sosial ekonomi masyarakat serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi aplikasi tersebut di tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai jurnal ilmiah, artikel dan buku yang relevan dengan transformasi digital di Indonesia serta implementasi DT-SEN dalam aplikasi SIKS-NG. Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode yang digunakan oleh Miles & Huberman yang meliputi 3 tahapan, seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIKS-NG memberikan kontribusi yang baik dalam pelayanan publik, terutama dalam penyaluran bantuan sosial, integrasi data serta mendukung pemerintah dalam melakukan penetapan kebijakan yang berbasis data. Selain itu, hadirnya aplikasi ini mendorong perubahan birokrasi dari tradisional menuju ke tata kelola pemerintahan yang bersifat digital dan mendorong terciptanya birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam implementasinya aplikasi SIKS-NG masih memiliki beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, akses jaringan yang terbatas, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia serta ketidaksesuaian data kependudukan dengan realita di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan infrastruktur dan akses jaringan yang merata di seluruh wilayah di Indonesia, peningkatan kompetensi manusia serta komitmen dari pemerintah untuk terus mengoptimalkan transformasi digital dalam upaya meningkatkan nilai kesejahteraan sosial masyarakat.

**Kata Kunci:** Transformasi Digital, SIKS-NG, DT-SEN, *E-Government*, Kesejahteraan Sosial

### 1. Pendahuluan

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan adalah salah satu strategi dalam meningkatkan efektivitas tata kelola publik, khususnya dalam pengelolaan data sosial ekonomi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk mengadopsi sistem digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan integrasi data secara real-time, sehingga mengurangi kesalahan administrasi manual, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan publik (Amelia & Fitrianto, 2025). Selain itu, digitalisasi juga membuka akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat sehingga pelayanan publik dapat menjadi lebih responsif dan inklusif. Namun, dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial sering terkendala oleh beberapa masalah. Fenomena exclusion error, di mana masyarakat miskin tidak terdata, serta inclusion error, di mana bantuan jatuh ke tangan yang tidak berhak, menjadi tantangan besar yang mengganggu efektivitas program bantuan sosial (J, 2025).

Seiring dengan perkembangan era digital, transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi pilar utama dalam mewujudkan efisiensi birokrasi dan layanan publik yang inklusif. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia menginisiasi kebijakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) sebagai bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pengurangan kemiskinan berbasis data yang akurat dan integrasi (Setyanto, 2025). Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai platform digital yang berfungsi untuk mengelola, memverifikasi, serta memperbarui data penerima bantuan sosial secara terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sistem ini berfungsi sebagai instrumen

pengolah data kemiskinan yang memfasilitasi pemutakhiran data secara berjenjang guna memastikan data dalam DTKS tetap mutakhir (Andriani et al., 2023). Implementasi SIKS-NG diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat proses verifikasi serta penyaluran bantuan kepada penerima manfaat.

Meskipun demikian, implementasi SIKS-NG masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa kendala utama yang ditemukan mencakup keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang tidak stabil dan pemadaman listrik, terutama di wilayah pedesaan (Zebua et al., 2024). Selain aspek teknis, rendahnya literasi teknologi di tingkat pelaksana desa serta ketidaksesuaian data NIK dengan data kependudukan pusat juga menjadi tantangan yang menghambat optimalisasi sistem. Kesenjangan digital ini menyebabkan pemanfaatan data dalam siklus perumusan kebijakan belum berjalan maksimal (Setyanto, 2025). Kendala tersebut menyebabkan proses pengajuan dan verifikasi data penerima bantuan sosial belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Penelitian terdahulu secara umum membahas mengenai implementasi aplikasi SIKS-NG melalui integrasi sistem, pemutakhiran DT-SEN serta berbagai kendala dalam proses pelaksanaannya, seperti infrastruktur yang kurang memadai serta kurangnya kompetensi pegawai dalam menjalankan aplikasi. Namun, penelitian lain belum menjelaskan secara spesifik mengenai faktor pendorong hadirnya aplikasi SIKS-NG serta peran transformasi digital dalam upaya peningkatan pelayanan dan tata kelola data sosial ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus terhadap seberapa efektif pelaksanaan aplikasi di tingkat daerah, tantangan dalam proses implementasinya serta kontribusi aplikasi dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transformasi digital dalam pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* melalui metode studi literatur.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Literatur. Studi Literatur merupakan jenis penelitian yang memiliki hubungan dengan kegiatan mengumpulkan, mencatat dan menterjemahkan dan mengelola data literatur yang sudah didapat (Hanifah & Purbosari, 2022). Pengelolaan data dalam metode ini merupakan kegiatan yang menghubungkan antara data yang didapatkan dengan topik yang dibahas.

Metode ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data secara lengkap dan akurat dari berbagai daerah di Indonesia mengenai transformasi digital dalam ruang lingkup birokrasi pemerintahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi pencarian dokumen sekunder seperti penelitian mengenai implementasi transformasi digital aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berfokus terhadap seberapa efektif implementasi aplikasi SIKS-NG dalam mengelola data kemiskinan serta proses pendistribusian bantuan. Selain itu, kami juga menggunakan sumber-sumber data resmi terkait seperti dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan sebagai acuan dan perbandingan mengenai angka kemiskinan dari sebelum dan sesudah diterapkannya aplikasi tersebut

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang meliputi 3 tahapan penting, seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Qomaruddin & Sa'adiyah, 2024). Reduksi data merupakan kegiatan memilih data, memisahkan antara data yang penting dan membuang data yang tidak digunakan untuk menyederhanakan proses analisis data. Penyajian data merupakan proses analisis dan penyampaian data dalam bentuk yang mudah dipahami. Dalam penelitian ini kami menggunakan analisis bersifat naratif dan deskriptif. Penarikan kesimpulan merupakan proses memahami makna dari berbagai literatur yang telah di analisis serta menentukan langkah strategis lanjutan dari penelitian ini.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### Hasil

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai kajian literatur yang bersumber dari artikel atau jurnal yang relevan dengan topik transformasi digital dan aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial. Selanjutnya, kami melakukan proses penyederhanaan data di mana kami mengambil beberapa data penting dari kajian literatur tersebut, kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dalam penelitian ini. Hasil penelusuran dari beberapa studi literatur dari penelitian terdahulu menunjukkan adanya kontribusi aplikasi SIKS-NG dalam mengelola data sosial ekonomi masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

Tabel 1.1 Tranformasi Digital Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation*

No	Peneliti & Tahun	Judul	Lokasi Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan
1.	Yevi Andriani, Sri Suwitri, Tri Yuningsih (2023)	Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan	Kabupaten Bengkulu Selatan	E-government, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), DTKS	Implementasi SIKS-NG mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah yang dapat mempermudah akses pengolahan bantuan sosial. Namun terdapat kelemahan, seperti terbatasnya sumber daya manusia dan banyaknya masyarakat yang belum terdata (Andriani et al., 2023).
2.	Sekar Arum Puspita Ramadhan, Isna Fitria Agustin (2025)	EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) SEBAGAI APLIKASI PENGOLAH DATA KEMISKINAN DESA	Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.	Efektivitas, SIKS-NG, Data Kemiskinan	SIKS-NG meningkatkan efektivitas dan integrasi data kemiskinan sehingga bantuan sosial tepat sasaran, tetapi mengalami kendala dalam bimbingan teknis yang belum sesuai dengan kondisi lapangan (Ramadhani & Agustina, 2025).
3.	Haromin, Dhika Andriyansah (2022)	EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) SEBAGAI APLIKASI PENGOLAH DATA KEMISKINAN DI DESA LAMAJANG	Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung	Efektivitas, e-government, SIKS-NG	Implementasi SIKS-NG cukup efektif dengan operator yang menguasai penggunaan aplikasi serta bantuan sosial yang tepat sasaran. Namun, implementasi tersebut masih mengalami beberapa kendala, seperti sarana prasarana yang belum maksimal serta verifikasi data lapangan yang tidak berjalan secara optimal (Haromin & Ardiansyah, 2022).

		KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG			
4.	Ergi Ramadan, Intan Nurlatifah, Ismi Ratnasari Shangadah, Sunandie Eko Ginanjar, Rahmat Santa(2024)	PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) UNTUK PENGAJUAN DTKS	Kelurahan Cisaranten Wetan	e-government, SIKS – NG, DTKS	SIKS-NG telah berjalan dengan cukup efektif dalam melakukan percepatan dan penetapan bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun, perlu adanya peningkatan fitur jumlah penerima bantuan DTKS untuk membantu pegawai dalam melakukan proses pengecekan (Ramadhan et al., 2024).
5.	Fony Pangandaheng, Joubert Baren Maramis, David Paul, Elia Saeran, Lucky Otto Herman Dotulong, Djurwati Soepeno (2022)	TRANSFORMASI DIGITAL: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR PADA SEKTOR BISNIS DAN PEMERINTAHAN	Literatur Sektor Pemerintahan	Transformasi digital, sektor pemerintah	Keberhasilan transformasi digital didorong oleh faktor kepemimpinan dan stakeholder yang mampu menciptakan kebijakan berbasis data. Namun, menghadapi hambatan dalam aspek kesiapan sumber daya manusia (Pangandaheng et al., 2022).
6.	Shelfiyana Yulfa, Dra. Damayanti Suhita, M.Si (2024)	Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SISK-NG) Berbasis E-Government Di Dinas Sosial Kabupaten Sragen	Dinas Sosial Kabupaten Sragen	SIKS-NG, Efektivitas, E - Government	Aplikasi SIKS-NG sangat cepat melakukan pengolahan data dibandingkan dengan cara manual. Namun, masih mengalami hambatan dalam sosialisasi kepada masyarakat dan human error (Yulfa et al., 2024)
7.	Widya Setyanto (2025)	DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI, PENURUNAN KEMISKINAN, DAN PEMBANGUNAN	Studi Literatur Pemerintahan di Indonesia	Satu Data Sosial Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan, pembangunan berkelanjutan.	Permasalahan kebijakan sosial terletak pada lemahnya integrasi data yang mengakibatkan data menjadi salah sasaran dan duplikasi program. Selain itu, dalam implementasinya, pengelolaan DT-SEN dalam aplikasi SIKS-NG menyoroti adanya kendala dari sisi interprobabilitas sistem dan

		BERKELANJUTAN : PENGALAMAN INDONESIA Widya Setyanto			pemutahiran data (Setyanto, 2025).
8.	Amelia, Fitrianto (2025)	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Transparansi Penyaluran Dana Sosial dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia	Studi Literatur Pemerintahan daerah	Sosial ,Pemerintahan daerah, teknologi digital	Jurnal tersebut menjelaskan bahwa integrasi teknologi informasi dalam sistem kesejahteraan sosial tidak hanya memperbaiki akurasi data, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan bantuan sosial.Namun terdapat hambatan berupa keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, serta belum meratanya komitmen pemerintah daerah (Amelia & Fitrianto, 2025).
9.	Syamsu J (2025)	Analisis Kebijakan Bantuan Sosial terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Digital Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Kebijakan publik, bantuan sosial digital,kesejahteraan masyarakat,implementasi kebijakan	Digitalisasi telah menciptakan percepatan dalam proses verifikasi dan penyaluran bantuan, namun belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Masalah ini terjadi akibat lemahnya infrastruktur digital dan rendahnya literasi teknologi (J, 2025).
10.	Daniel Elviden Arisman Zebua, Fatolosa Hulu, Meiman H. Waruwu, Martha Surya Dinata (2024)	Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation untuk Pengolahan Data Kemiskinan Di Desa Balohili Botomuzoi	Desa Balohili Botomuzoi	Efektivitas, sistem informasi kesejahteraan sosial next generation	Penerapan SIKS-NG di Desa Balohili Botomuzoi juga menghadapi banyak kendala. Fasilitas yang tersedia masih terbatas, ditambah dengan masalah listrik yang sering padam dan jaringan internet yang tidak stabil. Penggunaan aplikasi yang tidak fleksibel serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat membuat proses pendataan belum berjalan dengan baik, sehingga masih ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum terdata (Zebua et al., 2024).

### Tranformasi Digital Dalam Birokrasi Di Indonesia

Birokrasi merupakan sistem yang berada dalam ruang lingkup pemerintahan dan bekerja secara bersama – sama untuk mencapai tujuan birokrasi. Dalam ruang lingkup pemerintahan, birokrasi digunakan untuk mencapai pelayanan publik yang efektif dan efisien (Hermanu & Edyanto, 2024). Pencapaian pelayanan publik yang efektif dan efisien meliputi berbagai macam aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik dan juga hukum. Dalam penelitian ini, kami melakukan analisis berdasarkan aspek ekonomi dan sosial yang saling berhubungan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Transformasi digital merupakan salah satu pilar yang digunakan oleh pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Salah satu bentuk penunjang terciptanya transformasi digital adalah infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi seperti ketersediaan jaringan internet dengan kecepatan tinggi, server yang aman serta perangkat keras dan lunak yang canggih dapat membantu pemerintah dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat (Nursanty, 2023). Menurut data yang didapatkan oleh Indonesian Digital Report per awal tahun 2025, menunjukkan angka sebesar 356 juta koneksi seluler aktif yang setara dengan 125% dengan jumlah populasi masyarakat di Indonesia

Selain itu, mengutip data dari Indonesia Sosial Survey tahun 2025, menunjukkan data penggunaan aplikasi media sosial yang besar dari berbagai generasi, seperti generasi z yang memuncaki penggunaan aplikasi intstagram sebesar 52,4%, generasi milenial dengan aplikasi Facebook sebesar 57,1% dan generasi x yang memuncaki penggunaan aplikasi YouTube sebesar 47,6%. Data tersebut menunjukkan, adanya transformasi kehidupan manusia dari yang sebelumnya berbasis manual menjadi berbasis teknologi. Dari data tersebut, menunjukkan peningkatan dengan skala yang besar mengenai penggunaan layanan digitalisasi yang membuktikan bahwa masyarakat telah sukses dalam melakukan adaptasi terhadap penggunaan teknologi. Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah melakukan upaya inovasi teknologi dalam berbagai program unggulan pemerintah.

Salah satu bentuk transformasi digitalisasi dalam bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui peluncuran aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation) yang dapat mengelola data terpadu Sosial ekonomi nasional atau DT-SEN. Berdasarkan temuan lapangan dari berbagai kajian literatur mengenai transformasi digital dalam pengelolaan data sosial ekonomi masyarakat melalui DT-SEN dan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next-Generation telah menunjukkan transisi digital dalam ruang lingkup peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dari yang sebelumnya membutuhkan prosedur yang lama dan berbelit belit kini menjadi lebih ringkas dan dapat diakses dalam satu aplikasi. Hadirnya aplikasi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam melakukan pergeseran model birokrasi dari yang sebelumnya bersifat formal dan kaku menjadi berbasis *e-government* dengan model pemerintahan yang berdasarkan informasi. Jadi, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berdasarkan data yang ada di lapangan.

Penggunaan aplikasi SIKS-NG dalam pengelolaan data sosial ekonomi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan teknologi dalam sektor pemerintah tidak lagi berfungsi sebagai alat bantu dalam mengelola data, akan tetapi juga menjadi bagian penting dan utama dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas, efisiensi dan produktivitas di dalam organisasi (Andriani et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya peran strategis digitalisasi dalam menciptakan tata kelola yang modern dan berbasis data.

Penerapan *e-government* melalui aplikasi tersebut membantu menciptakan pergeseran pemerintahan dari yang bersifat manual bertransformasi menjadi digital dan terintegrasi. Sebelum hadirnya aplikasi ini, proses pendataan masyarakat miskin dilakukan secara manual melalui pendataan menggunakan kertas dan pulpen lalu data tersebut akan diolah secara manual dan baru disalurkan ke kementerian-kementerian yang membutuhkan. Hal tersebut mencerminkan birokrasi yang kaku dan berbelit belit karena memakan waktu yang lama serta sangat rentan terhadap kesalahan data. Hadirnya aplikasi ini membantu pegawai sektor pemerintah dalam mengelola data secara sistematis, terstruktur, menghasilkan data yang akurat yang membantu proses pengambilan keputusan serta dapat langsung terintegrasi secara *real time* dengan kementerian lain (Ramadhani & Agustina, 2025), sebagai kementerian dalam negeri, kementerian pendidikan dan sebagainya.

Dalam mengukur keberhasilan *e-government* di suatu negara, sangat bergantung kepada sumber daya manusia, sarana prasarana serta komitmen pemerintah untuk terus berinovasi dan memperbaiki berjalannya sistem tersebut. Hal ini sesuai dengan pandangan *e-government* membutuhkan komitmen yang kuat untuk merencanakan dan memulai hal baru dalam pemerintahan dikemukakan oleh Husri 2020 dalam Haromin & Ardiansyah, (2022) yang menjelaskan bahwa *e-government* memerlukan kesiapan pemerintah dari berbagai sisi seperti kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta regulasi dan anggaran dana.

## **Implementasi Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next-Generation Dalam Pelayanan Sosial Masyarakat**

Dalam implementasinya di berbagai daerah di Indonesia penggunaan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* menunjukan peforma yang luar biasa dalam meningkatkan efisiensi dana efektivitas dalam pengelolaan data ekonomi sosial masyarakat. Melalui penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo yang tepatnya di Kecamatan Jabon menunjukan bahwa penggunaan aplikasi SIKS-NG di wilayah tersebut menunjukan peforma yang cukup efektif. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bandung menunjukan kecakapan operator dalam menggunakan aplikasi sehingga proses transformasi dapat berjalan dengan optimal dana efektif. Selain itu, penelitian lain juga menunjukan keberhasilan dari penggunaan aplikasi SIKS-NG dalam menciptakan keteraturan penyaluran bantuan sosial melalui transformasi digital. Berdasarkan temuan di Kota Pasuruan dukungan penuh yang didapatkan dari masyarakat, direalisasikan dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas di lapangan (Safitri & Sa'diyah, 2026). Hal ini menunjukan adanya aspirasi positif dari masyarakat yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kelancaran dan peforma dari aplikasi tersebut.

Selanjutnya, dari sisi tata kelola pemerintahan, hadirnya aplikasi SIKS-NG sebagai pengelola DT-SEN sangat berpengaruh terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan aplikasi memungkinkan data terekam secara real time sehingga mengurangi praktik-praktik kecurangan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dan lembaga yang berwenang agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Namun, keberhasilan transformasi digital dalam sebuah sistem sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi dan kesiapan lembaga pemerintahan dalam menghadapi perubahan digital yang terjadi secara terus menerus.

Namun, dibalik beberapa dampak positif dari implementasi aplikasi tersebut di berbagai desa, masih ditemui beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan aplikasi hingga hari ini, seperti masih ditemukan masalah sistemik yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, khususnya dari sisi akurasi data dan pemerataan implementasi aplikasi, seperti sumber daya manusia yang terbatas dalam penggunaan aplikasi, infrastruktur yang belum memadai, data yang belum lengkap, kurangnya literasi digital masyarakat.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Mursyidah & Arydianti, (2024) melalui studi kasus yang dilakukan di Desa Keper, masih ditemui selisih yang cukup besar antara jumlah usulan alokasi bantuan sosial dengan jumlah alokasi realisasinya. Jenis bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) memiliki selisih sebesar 41 KPM antara jumlah alokasi SIKS-NG dengan jumlah realisasinya. Selain itu bantuan sosial sembako dan PKH masing-masing menunjukkan selisih sebesar 2 KPM dan 27 KPM.

Dari data tersebut, dapat kita amati bahwa selisih antara jumlah alokasi dan realisasi penerima bantuan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti NIK masyarakat yang tidak terdaftar serta tidak berdomisili di desa setempat. Permasalahan ini juga dapat berdampak terhadap timbulnya permasalahan dan perpecahan antara masyarakat dengan pihak operator selaku pelaksana aplikasi kesejahteraan sosial. Selain itu proses finalisasi data pusat yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan mengakibatkan kesenjangan antara masyarakat yang memenuhi syarat menerima bantuan justru dihapus dari sistem dan masyarakat yang tidak memenuhi syarat mendapatkan bantuan.

Penelitian serupa juga dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan dan menunjukan adanya penurunan angka kemiskinan yang signifikan setelah berljalannya aplikasi SIKS-NG di daerah tersebut. Lebih lanjut, data dari penelitian menunjukkan belum terjadi penurunan secara signifikan angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan dan cenderung mengalami kenaikan pada periode tahun 2020-2021 sebesar 0,34% dan bersifat konstan pada periode tahun 2022-2023. Data tersebut menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIKS-NG belum berjalan secara maksimal karena belum dapat mencapai tujuan dari peluncuran aplikasi tersebut, yaitu menurunkan angka kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kegagalan pegawai pemerintah dalam melakukan proses pendataan dan verifikasi berkas.

## **Tantangan Implementasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next-Generation Dalam Pelayanan Sosial Masyarakat**

Transformasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup budaya, pola kerja dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi birokrasi. Dalam

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9259>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

perspektif birokrasi, nilai dan norma yang diterapkan organisasi kepada anggotanya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem disuatu institusi (Bormasa et al., 2023). Jika suatu organisasi menerapkan nilai seperti adaptif dalam budaya kerja organisasi, anggota organisasi tidak akan merasa kaget dan tertekan pada saat masuknya teknologi baru dan asing karena mereka telah terbiasa menyesuaikan dengan berbagai perubahan. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui rotasi pekerjaan serta pembelajaran tindakan atau praktek kerja dapat membantu pegawai sektor publik dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat dan tidak dapat dikendalikan (Lie et al., 2022).

Jika ditinjau melalui kapasitas sumber daya manusia, implementasi aplikasi SIKS-NG yang dilakukan di daerah Kabupaten Kampar masih menunjukkan keterbatasan petugas yang ikut serta dalam proses pendataan serta belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengelolaan aplikasi SIKS-NG serta pemahaman mengenai pedoman DT-SEN meskipun telah dilakukan pengarahan dan sosialisasi dari perangkat daerah setempat (Herlinda et al., 2026). Selain itu, keterbatasan anggaran di tingkat daerah mengakibatkan terbatasnya sarana teknologi seperti komputer yang berimplikasi terhadap terhambatnya pengembangan dan praktek langsung petugas yang terjun di lapangan (Safitri & Sa'diyah, 2026). Selain itu, melalui penelitian serupa juga menunjukkan adanya ketidakstabilan sumber daya manusia. Ketidakstabilan ini meliputi pergantian operator secara terus menerus sehingga petugas yang telah berkompeten selalu tergantikan dengan petugas pemula yang belum mengetahui apapun mengenai pengelolaan aplikasi sehingga perlu pengajaran dan pendampingan dengan siklus yang berulang.

Lebih lanjut, implementasi aplikasi ini terhambat oleh infrastruktur teknologi yang tidak stabil sehingga menghambat proses pendataan dan pendistribusian data dalam aplikasi tersebut. Melalui penelitian yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi aplikasi tersebut terletak pada sistem pusat yang selalu mengalami gangguan (Safitri & Sa'diyah, 2026). Hal ini mengindikasikan bahwa keterbatasan infrastruktur tidak hanya terbatas alat pendukung seperti komputer dan jaringan, akan tetapi aplikasi yang sepenuhnya belum siap juga menjadi penghambat utama dalam implementasi di tingkat daerah di Indonesia.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut mengenai transformasi digital dalam pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG), dapat disimpulkan bahwa transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola data sosial ekonomi di Indonesia. Implementasi SIKS-NG terbukti mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta integrasi data, sehingga mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data. Selain itu, digitalisasi ini juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi, sekaligus mendorong pergeseran menuju sistem pemerintahan berbasis e-government yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, keberhasilan implementasi sistem ini belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, ketidaksesuaian data, serta kesenjangan literasi digital di tingkat masyarakat dan aparatur. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi, budaya kerja, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sistem informasi pemerintahan seperti SIKS-NG dan pengembangan DT-SEN memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis data. Secara praktis, hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketepatan program kesejahteraan sosial. Secara teoritis, memperkuat konsep transformasi digital dalam administrasi publik sebagai instrumen reformasi birokrasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi literatur dengan jumlah sumber terbatas, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi empiris secara menyeluruh di berbagai daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau metode campuran dengan cakupan wilayah yang lebih luas, serta mengkaji lebih dalam aspek implementasi teknis, kesiapan organisasi, dan dampak jangka panjang transformasi digital terhadap kesejahteraan masyarakat..

#### Reference

- Amelia, & Fitrianto. (2025). Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Transparansi Penyaluran Dana Sosial Dalam Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bidang Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*.
- Andriani, Y., Suwitri, S., Yuniningsih, T., Publik, A., Diponegoro, U., Pleburan, B., & Semarang, K. (2023). *Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation ( SIKS-NG ) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Jurnal Agregasi : Ju. 11(November), 129–147. <https://doi.org/10.34010/Agregasi.V11i2.11255>*
- Bormasa, M. F., Mustanir, A., Yunus, N. R., Amane, A. P. O., Alaslan, A., & Sunariyanto. (2023). *BIROKRASI INDONESIA. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI Anggota.*
- Hanifah, M., & Purbosari, P. P. (2022). *Studi Literatur : Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Guided Inquiry ( GI ) Terhadap Hasil Belajar*

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9259>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Kognitif, Afektif, Dan Psikomotor Siswa Sekolah Menengah Pada Materi Biologi. *BIODIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*, 08(2), 38–46.
- Haromin, & Ardiansyah, D. (2022). EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION ( SIKS-NG ) SEBAGAI APLIKASI PENGOLAH DATA KEMISKINAN DI DESA LAMAJANG KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG. 6(November).
- Herlinda, D., Nielwaty, E., & Elsi, M. (2026). Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. 6(1), 1708–1722. <https://doi.org/10.37680/Almikraj.V6i1.8997>
- Hermanu, I., & Edyanto. (2024). *BIROKRASI INDONESIA*.
- J, S. (2025). Analisis Kebijakan Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Era Digital Kabupaten Sijunjung. 4(3), 7688–7696.
- Lie, D., Nusannas, I. S., Aristana, N., Silalahi, M., Suarnaya, P., Islami, P. Y. N., Kusnadi, I. H., Retnowati, N. A., Nyoman, I. D., Usadha, Rosharita, Sofiyani, Ratnawati, Wahid, M. N. A., Suhardi, & Abdurrahim. (2022). *PERENCANAAN & PENGEMBANGAN SDM. Media Sains Indonesia*.
- Mursyidah, L., & Arydianti, F. P. (2024). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation ( SIKS-NG ) Dalam Pengusulan Bantuan Sosial. 10.
- Nursanty. (2023). *TRANSFORMASI DIGITAL DALAM ADMINISTRASI PUBLIK*. Seribu Bintang.
- Pangandaheng, F., Maramis, J. Baren, Saerang, D. P. E., Dotulong, L. O. H., & Soepeno, D. (2022). *DIGITAL TRANSFORMATION: A LITERATURE REVIEW IN THE BUSINESS AND GOVERNMENT SECTOR*. 10(2), 1106–1115.
- Qomaruddin, & Sa'adiyah, H. (2024). Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman. 1(2), 77–84.
- Ramadhan, E., Intan, N., Ismi, R. S., Ginanjar, S. E., & Santa, R. (2024). PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) UNTUK PENGAJUAN DTKS. 4(2), 109–115.
- Ramadhani, S. A. P., & Agustina, I. F. (2025). EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS – NG) SEBAGAI APLIKASI PENGOLAH DATA KEMISKINAN DESA. 14(04), 399–409.
- Safitri, S., & Sa'adiyah, D. F. (2026). EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SIKS-NG UNTUK PENDATAAN BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN DTSN DI DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN. 4(1).
- Setyanto, W. (2025). DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI , PENURUNAN KEMISKINAN , DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : PENGALAMAN INDONESIA. 266–283.
- Yulfa, S., Suhita, D. D., Si, M., Sistem, P., Kesejahteraan, I., & Next, S. (2024). Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation ( SIKS-NG ) Berbasis E-Government Di Dinas Sosial Kabupaten Sragen Oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riya.
- Zebua, D. E. A., Hulu, F., Waruwu, M. H., Dinata, M. S., & Mendrofa. (2024). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation Untuk Pengolahan Data Kemiskinan Di . 4, 1993–2000.